KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Anggaran : DPR Segera Bangun Mega Proyek
Tanggal : Senin, 02 November 2015
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 18

ANGGARAN

DPR Segera Bangun Megaproyek

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat akan segera membangun megaproyek Kompleks Parlemen pada 2016. Hal ini dipastikan setelah anggaran senilai Rp 740 miliar masuk mulus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.

"Kami cukup kaget dengan tambahan anggaran untuk DPR yang besar tersebut. Kalau ini benar untuk pembangunan Kompleks Parlemen, ini proyek tahun jamak. Dan ini tidak transparan dalam proses perencanaannya," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi, di Jakarta, Minggu (1/11).

Pagu anggaran untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 adalah 4,6 triliun. Tambahan anggaran senilai Rp 740 miliar baru muncul pada saat pembahasan antara Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Apung menegaskan, masyarakat akan selalu menghubungkan masifnya permintaan DPR itu dengan kinerja para wakil rakyat secara perseorangan ataupun kelembagaan. Faktanya, masyarakat masih melihat DPR sebagai lembaga ataupun perseorangan lebih banyak bekerja untuk kepentingan pribadi dan kelompok ketimbang untuk masyarakat.

Secara terpisah, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang berpendapat, masuknya tambahan anggaran Rp 740 miliar untuk DPR dalam APBN 2016 bisa dimaknai dua kemungkinan. Pertama, alih-alih menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro justru lebih berkompromi dengan DPR.

> **Kalau ini benar untuk pembangunan Kompleks Parlemen, ini proyek tahun jamak. Dan ini tidak transparan dalam proses perencanaannya.**

Sebelumnya, Presiden telah menyatakan menolak megaproyek DPR sehingga usulan tidak masuk dalam RAPBN 2016. Bahkan, Presiden dikabarkan menolak menandatangani prasasti pengembangan Kompleks Parlemen seusai membacakan pidato pengantar Nota Keuangan RAPBN 2016, 14 Agustus.

Kemungkinan kedua, Presiden Joko Widodo melakukan standar ganda. Kepada publik mengatakan menolak rencana megaproyek DPR, tetapi diam-diam ia merestui Menteri Keuangan untuk menyetujui permintaan DPR tersebut dalam pembahasan RAPBN 2016.

Tujuh proyek

Megaproyek pengembangan Kompleks Parlemen terdiri atas tujuh proyek. Total anggarannya diperkirakan sekitar Rp 1,6 triliun. Menurut rencana, pembangunan dimulai 2016.

Proyek itu meliputi pembangunan ruang kerja anggota DPR dan tenaga ahli, alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan baru DPR, akses publik menuju gedung DPR, pusat pengunjung parlemen, dan ruangan pusat pengkajian legislasi.

Tahap terakhir adalah mengintegrasikan kawasan legislatif di sekitar Senayan menjadi satu kawasan parlemen. Semula, DPR mengusulkan anggaran Rp 600 miliar sampai Rp 700 miliar dalam RAPBN 2016 untuk pembangunan gedung baru, yakni untuk ruang kerja anggota DPR dan alun-alun demokrasi.

Ketua DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya Setya Novanto enggan berkomentar soal ini. Ditanya di sela-sela rapat paripurna DPR pekan lalu, ia hanya mengatakan, hal itu diserahkan ke Sekretariat Jenderal DPR.

Ketua Badan Anggaran DPR yang juga dari Fraksi Partai Golongan Karya, Ahmadi Noor Supit, menyatakan, pembangunan gedung dilakukan untuk lembaga tinggi negara secara bergiliran. Kini saatnya DPR. "Saya kira *fair fair* saja. Giliran saja," kata Ahmadi.

Ahmadi berpendapat, gedung ruang kerja DPR saat ini sudah melebihi kapasitas. Untuk itu, gedung DPR layak dikaji ulang. Ia membandingkan dengan gedung kementerian yang disebutnya mewah.

"(Kementerian) Perdagangan, lebih mewah daripada hotel bintang lima. Pariwisata juga. Luar biasa mewahnya. Apalagi BUMN," kata Ahmadi.

Meski demikian, Ahmadi mengonfirmasi, memang belum ada kesepakatan tahun jamak dalam penganggaran megaproyek Kompleks Parlemen. Namun jika anggarannya sudah dialokasikan tahun depan, logikanya akan berlanjut sampai tuntas. (LAS)